

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab terdahulu dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, pada periode formatif pemikiran keagamaan Muhammadiyah yang diformulasikan oleh Dahlan mengalami pergeseran atau transformasi signifikan. Jika pada masa Dahlan pemikiran keagamaan bercorak rasionalistik, terbuka dan berorientasi pembaruan sosial (*social reform*), maka pada masa setelah Dahlan pemikiran Muhammadiyah cenderung bercorak purifikasionis, dogmatis dan juristik (skolastik).

Orientasi pemikiran keagamaan Dahlan yang rasional dan terbuka menjadi landasan bagi pembaruan sosial yang dilakukan bersama Muhammadiyah. Tidak mengherankan jika sampai taraf tertentu Dahlan diidentifikasi sebagai sosok ‘ulama atau pemikir praktis (*practical thinker*) yang mengembangkan teologi praktis (*practical theology*). Identitas ini lebih dari sekedar “seorang pragmatis sejati” (*a true pragmatist*), seperti dinyatakan Alfian. Merujuk kepada tipologi yang dibuat oleh Rahman, Dahlan dapat dikelompokkan ke dalam figur modernis awal (*early modernist*), seperti ‘Abduh. Sebagai *governing elite* Muhammadiyah periode formatif, pemikiran keagamaan Dahlan mengalami transformasi menjadi pandangan resmi Muhammadiyah.

Terjadinya transformasi religio-intelektual setelah Dahlan tidak dapat dipisahkan dari munculnya tendensi radikalisme dalam sikap politik yang ditunjukkan oleh sebagian elite 'ulama Muhammadiyah yang berpengaruh saat itu, baik terhadap kebijakan kolonial Belanda maupun terhadap penyebaran atau penetrasi Kristen yang semakin intensif, terutama setelah meninggalnya Dahlan. Dalam konteks ini, sikap radikal yang timbul tidak terlepas dari interaksi elite Muhammadiyah, seperti Haji Fakhruddin, dengan Sarekat Islam yang secara politik memilih jalan radikal dan menempuh sikap non-kooperasi terhadap pemerintahan kolonial Belanda dan menguatnya pengaruh Kristen.

Selain itu, terjadinya kebangkitan religio-politik di Tanah Suci secara tidak langsung membawa atmosfer baru dalam wacana keagamaan di Indonesia. Meskipun tidak ditemukan adanya mata rantai intelektual yang menyambungkan elite 'ulama Muhammadiyah waktu itu kepada Wahhābiyyah, namun dominannya tema-tema keagamaan yang berkembang, seperti tentang *shirk*, bid'ah, khurafat dan sikap non-madhab dan *ijtihad*, menyiratkan masuknya pengaruh ajaran Wahhābiyyah tersebut. Literatur-literatur keagamaan yang diproduksi oleh 'ulama Muhammadiyah seperti Mas Mansur dan Ki Bagus Hadikusuma menekankan pada purifikasi 'aqidah dari praktik-praktik yang mengarah kepada *shirk*.

Pada masa setelah Dahlan juga berkembang orientasi juristik atau shari'ahistik yang kuat, atau -meminjam Hodgson- *shari'ah-mindedness*, di kalangan 'ulama Muhammadiyah, dengan dibentuknya Majelis Tarjih sebagai lembaga yang menangani terutama masalah-masalah keagamaan yang bersifat *fiqhiyyah*. Namun demikian, tendensi kepada reformisme juga tetap berlangsung

pada masa Mas Mansur, seperti dapat dilihat dari pandangan keagamaannya tentang *ijtihad* dan kenisbian (relativitas) pemikiran keagamaan yang dihasilkan oleh ‘ulama meyangkut masalah-masalah *mu‘āmalah*. Dalam konteks ini, orientasi reformisme Mas Mansur ini mencerminkan kontinuitas dari corak pemikiran keagamaan Dahlan yang rasionalistik. Sementara orientasi dogmatis dan juristik yang timbul kemudian dapat disebut sebagai tanda diskontinuitas corak pemikiran keagamaan.

*Kedua*, relasi sosial-intelektual ‘ulama Muhammadiyah menunjukkan adanya kompleksitas, jika dilihat dari genealogi intelektual mereka. Sebagian besar elite ‘ulama Muhammadiyah pada periode pertengahan ini merupakan figur-figur yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan pesantren tradisional, lembaga pendidikan keagamaan di Timur Tengah (Makkah atau Mesir), dan lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Muhammadiyah sendiri. Sebagian ‘ulama Muhammadiyah merupakan produk dari pendidikan campuran antara dua atau bahkan tiga lembaga pendidikan sebagai basis intelektual keagamaan ‘ulama (elite) Muhammadiyah.

Dari sini tampak adanya relasi sosial dan intelektual dalam memproduksi dan mereproduksi pemikiran keagamaan dalam Muhammadiyah. Sekalipun kebanyakan elite ‘ulama Muhammadiyah periode pertengahan ini memperoleh pendidikan pesantren tradisional, namun mereka membangun suatu komunitas epistemik dalam Muhammadiyah dan membentuk suatu komunitas epistemik dan blok historis yang berbeda dari pemahaman keagamaan yang diadopsi oleh ‘ulama pesantren.

Pada masa-masa antara 1940-an sampai akhir 1980-an, yang dapat disebut sebagai periode pertengahan Muhammadiyah, dapat dilihat adanya kontinuitas pemikiran keagamaan yang didominasi oleh isu-isu pemurnian *'aqīdah* dari praktik-praktik yang mengandung *shirk*, khurafat dan bid'ah. Hal ini dapat dikaitkan dengan dominasi 'ulama sebagai elite dalam Muhammadiyah yang merumuskan paham keagamaan yang resmi, baik dalam bidang *'aqīdah* (dogmatis) maupun *fiqhiyyah* (juristik atau shari'ahistik) yang diadopsi sebagai paham keagamaan dalam Muhammadiyah.

Karena itu, pemikiran keagamaan elite 'ulama Muhammadiyah periode pertengahan ini dapat dikatakan cenderung bercorak skolastik (dogmatis) dan juristik. Konsep Islam skolastik dan juristik dalam pandangan Muhammadiyah yang antara lain tertuang dalam *Himpunan Putusan Tarjih* dan pemikiran purifikasionis kalangan 'ulama elite mendominasi alam pikiran keagamaan Muhammadiyah. Tema-tema kembali kepada al-Qur'ān, pemberantasan bid'ah dan menguatnya orientasi dogmatis dan juristik menunjukkan berkembangnya ideologi purifikasionisme dan skolastisisme.

Tipologi pemikiran keagamaan 'ulama periode pertengahan dapat disebut sebagai ortodoks. Ortodoksi pemikiran keagamaan dikonstruksi oleh relasi religio-intelektual 'ulama yang membentuk komunitas epistemik atau blok historis dapat dinyatakan sebagai diskontinuitas historis dan epistemik dari reformisme Dahlan atau liberalisme Mas Mansur, tetapi pada saat yang sama mencerminkan kontinuitas dari tendensi purifikasionis yang juga tumbuh pada masa Mas Mansur.

Pemikiran keagamaan Muhammadiyah pada periode pertengahan juga bercorak ideologis. Hal ini tidak terlepas dari faktor relasi intelektual dan politik elite Muhammadiyah periode tersebut. Pemikiran yang bersifat ideologis dirumuskan oleh elite organisasi yang memimpin (*governing elite*) sebagai respon terhadap dinamika kehidupan sosial, keagamaan dan politik. Ini tercermin dalam produk-produk pemikiran, seperti *Kepribadian Muhammadiyah*, *Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah* dan *Khittah Muhammadiyah* yang diproduksi selama periode pertengahan.

*Ketiga*, selama periode kontemporer pemikiran keagamaan dalam Muhammadiyah mengalami kontinuitas dan diskontinuitas, tidak semata-mata dalam pengertian diakronis atau kronologis, tetapi terutama dalam pengertian epistemik-dialektis. Hal ini disebabkan sejak dekade 1990-an terjadi pergeseran signifikan dari orientasi pemikiran keagamaan sebagai akibat dari menurunnya peran ‘ulama yang berorientasi shari’ah dan munculnya kelompok intelektual produk pendidikan tinggi modern sebagai suatu komunitas epistemik baru.

Pergeseran sosial intelektual ini membawa kritisisme terhadap keamanan religio-intelektual Muhammadiyah yang selama ini berorientasi purifikasionis dan *shari’ah-minded*. Kalangan intelektual yang menjadi bagian dari elite Muhammadiyah mulai menawarkan perspektif baru dalam memahami dan menafsirkan doktrin keagamaan Islam atau teks-teks al-Qur’ān.

Pada periode kontemporer muncul gagasan-gagasan tentang pentingnya revitalisasi *tajdīd* dan *ijtihād*, dan pentingnya reorientasi dan perluasan pemikiran keagamaan, dari wilayah yang semata-mata bersifat dogmatis dan juristik kepada

wilayah sosial yang lebih luas dan kompleks. Tema-tema keagamaan bergeser dari purifikasionisme menuju re-interpretasi terhadap warisan intelektual Islam dan Muhammadiyah dengan pendekatan dan metode baru. Pendekatan baru itu meliputi penggunaan perangkat metodologis ilmiah, seperti hermeneutika dan ilmu sosial kritis, tidak hanya pendekatan yang cenderung *fiqhiyyah* dan tekstual.

Reinterpretasi doktrin-doktrin dan sumber-sumber keagamaan Islam dan kontekstualisasinya dengan dinamika tuntutan zaman menghasilkan tema-tema *tawhīd* sosial dan wacana pluralisme keagamaan, dan penggunaan pendekatan ilmiah (historis, sosiologis, antropologis) dalam pemahaman Islam. Selain dikembangkan metodologi dalam pemikiran hukum Islam (*istinbāṭ* atau *tarjih*), dirumuskan pula metodologi (*manhaj*) pengembangan pemikiran keislaman secara luas, yang mengombinasikan pendekatan *bayānī*, *burhānī* dan *‘irfānī*.

Pemikiran-pemikiran yang dihasilkan oleh kelompok intelektual yang menawarkan pendekatan baru dan memasukkan wacana keagamaan yang dianggap berasal dari luar tradisi Islam menggambarkan munculnya komunitas epistemik atau blok historis baru yang cenderung berpikiran liberal, yang direpresentasikan, misalnya, oleh Amin Abdullah, Abdul Munir Mul Khan, Ahmad Syafii Maarif, dan yang bercorak transformatif, seperti Moeslim Abdurrahman dan komunitas epistemik dan blok historis baru yang tergabung dalam JIMM.

Secara singkat dapat dinyatakan bahwa pemaparan historis terdahulu menghasilkan temuan teoretis berikut: kontinuitas dan diskontinuitas pemikiran keagamaan dalam Muhammadiyah, sejak periode formatif sampai periode kontemporer berlangsung tidak semata-mata secara diakronis, tetapi terutama

secara epistemik dan dialektis. Terjadinya kontinuitas dan diskontinuitas tersebut merupakan suatu keniscayaan sejarah karena munculnya tantangan yang berbeda pada setiap episode dan *epoch* sejarah perkembangan Muhammadiyah. Pemikiran keagamaan yang diproduksi dan direproduksi oleh elite ‘ulama Muhammadiyah juga dipengaruhi oleh akses mereka terhadap sumber-sumber pengetahuan yang menjadi inti dari genealogi intelektual mereka, *epistêmê* yang berbeda, dan penafsiran yang mereka lakukan dalam konteks sosial, historis dan intelektual, baik pada level global maupun lokal.

## **B. Implikasi Teoretis dan Keterbatasan Studi**

### **1. Implikasi Teoretis**

Kajian sejarah intelektual berikut kesimpulan yang dipaparkan di atas membawa beberapa implikasi teoretis sebagai berikut:

*Pertama*, secara historis pemikiran keagamaan dalam Muhammadiyah mengalami kontinuitas dan diskontinuitas dari reformisme ke purifikasionisme pada fase-fase formatif. Sementara itu, pada fase-fase pertengahan, terjadi kontinuitas pemikiran keagamaan yang bercorak purifikasionis atau revivalis ortodoks dan tumbuhnya pemikiran ideologis Muhammadiyah. Dalam perkembangan kontemporer, muncul tendensi liberal dan transformatif, tetapi pada saat yang sama tendensi revivalisme ortodoks juga berkembang.

Jika Abdul Munir Mul Khan membuat pembabakan sejarah pemikiran keagamaan yang cenderung linier atau kronologis, maka disertasi ini menemukan fenomena historis yang menunjukkan bahwa dinamika religio-intelektual dalam

Muhammadiyah tidak dapat dilihat semata-mata secara linier atau kronologis, tetapi sebaliknya harus dipotret secara epistemik dan dialektis. Pada satu fase sejarah, corak pemikiran keagamaan tidaklah bersifat tunggal, tetapi dapat saja mencerminkan varian-varian yang saling berinteraksi atau terjadinya dialektika antar corak-corak pemikiran keagamaan yang beragam.

*Kedua*, formulasi pemikiran keagamaan yang bersifat ideologis dan resmi melibatkan elite ‘ulama yang memimpin (*governing elite*) dan elite yang memiliki pemahaman keagamaan yang dianggap sejalan dengan pemikiran *mainstream*. Kelompok elite ‘ulama membentuk komunitas epistemik dan blok historis yang mengarahkan orientasi pemikiran keagamaan formal dalam Muhammadiyah.

Dalam hal ini, pemikiran ortodoks dikonstruksi oleh figur-figur elite ‘ulama yang memiliki relasi sosial dan intelektual sekaligus relasi politik (kuasa), yang ikut membentuk formulasi pemikiran keagamaan ideologis, seperti tampak misalnya pada rumusan *Kepribadian Muhammadiyah, Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah*, dan *Khittah Politik*, yang dirumuskan melalui forum-forum resmi Muhammadiyah. Akibatnya, kalangan ‘ulama atau intelektual yang tidak termasuk dalam *governing elite* cenderung berada di luar pemikiran *mainstream*, dan karenanya mengembangkan pemikiran dan pendekatan yang dianggap keluar dari tradisi pemikiran Muhammadiyah. Dalam hal ini, ortodoksi pemikiran keagamaan dalam Muhammadiyah dikonstruksi secara sosial (*the social construction of orthodoxy*), dan bahkan organisasional.

Disertasi ini menemukan corak pemikiran yang dialektis dalam komunitas epistemik dan blok historis yang dinamis, tidak semata pada level pemikiran



formal, tetapi juga yang berkembang di kalangan “non-governing elite.” Dalam suatu kurun waktu historis (*epoch*), terdapat dialektika antara berbagai corak pemikiran keagamaan tersebut, terutama pada periode kontemporer, antara kecenderungan revivalis-ortodoks, liberal dan transformatif. Ketiga corak tersebut berdebat tidak saja dalam isu-isu seperti pluralisme keagamaan atau politik Islam, tetapi juga isu-isu metodologis (penafsiran teks).

*Ketiga*, temuan disertasi ini mengenai tipe-tipe pemikiran keagamaan mengimplikasikan bahwa tipologisasi yang cenderung monolitik atau dikotomis terhadap Muhammadiyah tidak dapat dipertahankan lagi. Pemikiran keagamaan dalam Muhammadiyah tidak berwajah tunggal, seperti hanya purifikasionis atau revivalis ortodoks, seperti disimpulkan oleh Peacock atau Federspiel di muka, atau hanya dijelaskan secara dikotomis, antara konservatif dan progresif, seperti dinyatakan terdahulu oleh Pradana Boy.

Sebaliknya, disertasi ini menunjukkan varian-varian yang lebih beragam (*multi-variants*), baik di kalangan purifikasionis, dari purifikasionis awal atau yang belakangan (*neo-revivalis*), maupun di kalangan liberal, mulai proto-liberal, liberal dan kemudian liberal yang liberatif atau transformatif. Dalam jangka panjang, Muhammadiyah perlu mengembangkan diri sebagai wadah pencahar (*melting pot*) yang efektif bagi berbagai tendensi atau arus religio-intelektual (*religio-intellectual currents*) tersebut, melalui kerangka metodologis yang komprehensif dan terpadu.

*Keempat*, dalam sejarah religio-intelektual Muhammadiyah dikenal adanya pemikiran keagamaan formal atau resmi (*official*) yang tertuang dalam berbagai

dokumen organisasi sebagai produk dari forum pengambilan keputusan organisasi, seperti keputusan muktamar dan musyawarah *tarjih*. Pemikiran keagamaan resmi dihasilkan secara kolektif oleh ‘ulama melalui forum-forum resmi. Dalam hal ini, pengaruh elite ‘ulama yang memimpin dalam organisasi atau majelis dan lembaga yang ada tampak sangat penting, karena mereka menyusun rancangan pemikiran yang dibahas dan diformalisasikan secara kolektif (*jama’i*).

Selain itu, terdapat pemikiran keagamaan yang dapat disebut “setengah resmi” (*semi-official*), yaitu pemikiran yang dihasilkan oleh individu-individu ‘ulama Muhammadiyah yang karena posisi mereka sebagai elite, maka pemikiran keagamaan tersebut menjadi pendapat “setengah resmi.” Pemikiran keagamaan setengah resmi tersebut merupakan penjelasan atau tafsiran terhadap doktrin keagamaan yang secara formal dianut oleh Muhammadiyah. Ketua-ketua Muhammadiyah dan elite ‘ulama lain yang dipandang ahli dalam doktrin dan ideologi keagamaan Muhammadiyah menjadi referensi religio-intelektual, karena pemikiran mereka dinilai mencerminkan pemikiran keagamaan *mainstream* dalam Muhammadiyah. Tidak jarang pandangan keagamaan mereka diadopsi sebagai pemikiran keagamaan yang secara sosial dikonstruksi sebagai ortodoks.

Dalam hal ini, terdapat hubungan yang erat antara pemikiran individual dan pemikiran formal institusional, keduanya saling mempengaruhi dan melengkapi. Namun, dalam banyak kasus, yang terjadi adalah transformasi dan formalisasi pemikiran individual menjadi pemikiran institusional, baik melalui *ijtihad* kolektif maupun pengadopsian pemikiran individual menjadi pemikiran

formal, terutama karena posisi ‘ulama atau pemikirnya sebagai bagian dari *governing elite*.

## **2. Keterbatasan Studi**

Kesimpulan-kesimpulan dan implikasi teoretis yang dihasilkan oleh studi ini masih sangat terbuka untuk dikritisi dan direvisi, karena disadari bahwa studi ini masih mengandung beberapa keterbatasan, baik teoretis maupun metodologis.

*Pertama*, tipologi pemikiran, komunitas epistemik atau blok historis yang dihasilkan oleh disertasi ini bisa saja mengandung kelemahan karena adanya simplifikasi (penyederhanaan). Namun, sumber-sumber sejarah yang dapat diperoleh menyiratkan validitas adanya varian-varian pemikiran atau komunitas epistemik yang beragam tersebut.

*Kedua*, disadari bahwa orientasi dari disertasi ini cenderung elitis, karena memfokuskan pada pemikiran elite ‘ulama atau pemikir, baik yang memimpin (*governing elite*) maupun yang tidak memimpin (*non-governing elite*). Hal ini sulit dihindari karena pemikiran keagamaan dalam Muhammadiyah, baik yang formal atau resmi maupun yang tidak, dan juga literatur keagamaan yang menjadi referensi religio-intelektual Muhammadiyah, pada umumnya diproduksi dan direproduksi oleh kalangan elite, meskipun tidak semua elite menghasilkan pemikiran keagamaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan (teks).

*Ketiga*, sumber-sumber untuk penulisan disertasi ini juga disadari masih terbatas dan belum mencakup seluruh fase dari episode sejarah intelektual secara komprehensif, karena harus diakui ada fase-fase dalam sejarah Muhammadiyah

yang produktif secara religio-intelektual, dan ada fase-fase sejarah yang kurang produktif dari segi karya-karya pemikiran keagamaan (atau sekedar reproduksi). Wacana keagamaan yang diangkat juga didasarkan pada tersedianya sumber-sumber yang dapat ditemukan dan dipandang relevan untuk menunjukkan terjadinya kontinuitas dan diskontinuitas pemikiran keagamaan.

Di samping itu, studi ini belum mencakup pemikiran keagamaan yang dihasilkan oleh ‘ulama atau pemikir keagamaan di daerah-daerah yang sejatinya juga berkembang secara dinamis dan produktif. Topik ini bisa menjadi wilayah studi yang penting dilakukan oleh peneliti lain di masa mendatang, dengan perspektif dan pendekatan yang berbeda dari yang digunakan oleh disertasi ini.

### **C. Saran-Saran**

Berdasarkan kajian tersebut di atas, penting di sini dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

*Pertama*, Pimpinan Muhammadiyah di semua level, mulai pusat sampai daerah dan ranting, hendaknya menumbuh-kembangkan atmosfer intelektual yang kondusif bagi terjadinya dialog yang intensif dan produktif antara berbagai varian pemikiran keagamaan dalam Muhammadiyah, tanpa harus saling menegasikan, menghakimi dan mengklaim pemikirannya sebagai paling benar. Pimpinan Muhammadiyah hendaknya mengakomodasi beragam orientasi pemahaman keagamaan dan tidak mengucilkan, apalagi mengkafirkan, individu atau kelompok yang memiliki pemikiran yang dianggap berbeda atau mengembangkan gagasan-gagasan yang belum pernah muncul dalam tradisi Muhammadiyah. Karena itu,

perlu pengembangan dan pengarusutamaan (*mainstreaming*) wawasan “pluralisme internal” dan bahkan multikulturalisme dalam Muhammadiyah.

*Kedua*, pengembangan pemikiran keagamaan dalam Muhammadiyah, baik berupa fatwa keagamaan yang berkaitan dengan keyakinan (*‘aqīdah*) dan *‘ibādah* maupun berupa wacana pemikiran sebagai respons intelektual terhadap kondisi sosial, politik dan kemasyarakatan, hendaknya mempertimbangkan pendekatan-pendekatan yang terpadu dan komprehensif, sehingga produk pemikiran yang dihasilkan dapat menjawab masalah-masalah aktual yang timbul dan berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat umum, tidak hanya warga Muhammadiyah.

*Ketiga*, semua warga dan pimpinan Muhammadiyah perlu terus menerus mengembangkan tradisi intelektual dan memperbanyak bacaan sebagai upaya memperluas dan meningkatkan wawasan keagamaan yang lebih kontekstual dengan tantangan modernitas. Tradisi ini akan mencerminkan karakter diri sebagai eksponen dari persyarikatan yang sudah dikenal sebagai gerakan *tajdīd* yang mencerminkan “Islam berkemajuan.” Hanya dengan cara demikian-lah, warga Muhammadiyah akan mampu berperan dalam proses pencerahan peradaban bangsa di masa mendatang.[]